

Efektivitas Kapasitas Kelembagaan BPBD Sumatera Barat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Ade Lestari, Zikri Alhadi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: Ade.lestari.lubis19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mengurangi risiko bencana. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian tersebar yaitu di kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat, kediaman informan dan via telepon. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitiannya adalah beberapa kepala bidang, kepala seksi dan staf di BPBD Provinsi Sumatera Barat serta beberapa anggota forum dan non governmental organization pengurangan risiko bencana. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu faktor pendukung berupa koordinasi yang cukup, kemampuan pegawai, logistik yang cukup dan forum pengurangan risiko bencana (PRB), sedangkan penghambatnya adalah pemahaman yang kurang dalam penanggulangan bencana dan sulit dalam kolaborasi kebijakan.

Kata Kunci: efektivitas, BPBD, Bencana

The purpose of this research was to determine several supporting and inhibiting factors that affect the effectiveness of the institutional capacity of the regional disaster management agency of West Sumatra in an effort to reduce disaster risk. This research method is a qualitative descriptive. The locations of the research were scattered at the regional disaster management agency of West Sumatra Province office, informant's residence and via telephone. Data collection uses interviews, observation, and study documentation. The research informants were several heads of departments, section heads and staff at the West Sumatra Province Regional Development Planning Agency and several members of the forum and non-governmental disaster risk reduction organizations. The results of the research found are supporting factors in the form of adequate coordination, employee capability, adequate logistics and disaster risk reduction forums (DRR), while the obstacle is a lack of understanding in disaster management and difficult collaboration in policy.

Keywords: effectiveness, BPBD, disaster



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2020 by author.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan kejadian yang mengerikan bagi umat manusia, baik itu bencana alam maupun bencana sosial yang penyebabnya ulah tangan manusia. Bencana pun sangat kecil kemungkinan akan kita hindari apabila kita kurang persiapan dan pengetahuan mengenai kebencanaan.

Dalam Undang Undang Nomor 24, 2007) tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Perihal kebencanaan pada masa dewasa ini umat manusia sudah mulai berfikir bagaimana cara agar meminimalisir terjadinya bencana atau minimal mengurangi dampak daripada bencana. Dengan mengupayakan berbagai cara termasuk dengan mengorganisir massa agar dapat menjadi manusia - manusia yang waspada dan siaga dalam menghadapi keterkejutan akan bencana.

Indonesia sebagai negara yang rawan akan terjadinya bencana turut serta dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana. Salah satu upayanya adalah membentuk perangkat khusus untuk memajemen akan kebutuhan terhadap upaya dalam penanggulangan, pengurangan, mitigasi bencana dan sebagainya. Provinsi Sumatera Barat yang juga secara geografis memiliki banyak potensi bencana tentu membutuhkan suatu sistem dan upaya agar segala risiko dan kerusakan bisa diminimalisir (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.).

BPBD Provinsi Sumatera Barat hadir sebagai bentuk lembaga yang bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana. BPBD Provinsi Sumatera Barat tentunya harus memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi personil, skill personil maupun logistitik. Pada dasarnya pemerintah melalui program - program penanggulangan bencananya bersifat melayani masyarakat dengan mengupayakan pengurangan risiko bencana.

Penelitian ini membahas mengenai kapasitas kelembagaan tersebut. Kapasitas kelembagaan pada BPBD Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk ditinjau sebagai tolak ukur efektifnya setiap

kinerja mereka dalam program - program penanggulangan bencana diprovinsi Sumatera Barat. Upaya pemerintah dalam menjawab tantangan kebencanaan diprovinsi Sumatera Barat khususnya. Segala bentuk upaya yang dimaksud tentu harus jelas sistematika dan penanggung jawabnya, maka kelembagaan dalam BPBD Provinsi Sumatera Barat

Adapun dalam setiap program yang dijalani adanya ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang bisa mempengaruhi keberhasilan program - program kerja dari BPBD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan setiap keberhasilan program juga dapat diambil penilaian mengenai efektivitas kapasitas kelembagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pendahuluan diatas terdapat tinjauan pustaka yang relevan terhadap penelitian ini yaitu tentang efektivitas. Dimana efektivitas menurut Steers (1977) dalam Edy Sutrisno (Sutrisno, 2011) adalah keterkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Kemudian Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Menurut Kapucu, Healy, dan Arslan (2011)

dalam Gita dan Maya (Prafitri & Damayanti, 2016) adalah suatu sumberdaya, tingkat kepemimpinan, kemampuan atau keahlian masyarakat yang memadai, tingkatan tertentu pada pelembagaan (perubahan hal-hal baru yang bernilai baik). kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus (Andi Samsu Alam dan Ashar Prawitno, 2015). Pengembangan kapasitas penting dalam peningkatan kemampuan kinerja aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara yang dapat mengganggu kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik (Novita Sari dkk, n.d.). Sedangkan lembaga Djogo, Sunaryo, dan Sirait (2003) dalam Gita dan Maya (Prafitri & Damayanti, 2016) menyebutkan bahwa umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang.

Integrasi dapat diartikan sebagai proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang lebih serasi. Integrasi ini tentu saja sangat diperlukan karena hal ini

merupakan kekuatan penting bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan menangani bencana alam (Arqom, 2012).

Inti dari koordinasi adalah proses pengelolaan ketergantungan antar aktivitas; yang terdapat dalam organisasi (human system), ketergantungan aktivitas juga berarti ketergantungan antar pelaku atau aktor yang menjalankannya. Koordinasi merupakan inti dari operasi organisasi, yang memungkinkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi dapat diraih (Nia Juliawati, 2012). Koordinasi merupakan proses penyatu paduan sasaran serta kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Adi Hartono, 2016).

Khan menjelaskan dalam Zikri (Alhadi, 2014) secara komprehensif definisi dari manajemen bencana sebagai "sum total of all activities, programmes and measures which can be taken up before, during and after a disaster with the purpose to avoid a disaster, reduce its impact or recover from its losses." (Khan; 46) Untuk mencari solusi atas persoalan bencana yang merupakan masalah publik, maka

dibutuhkan manajemen bencana agar dampak buruk dari bencana bisa direduksi (Raudya Dimas Wicaksono dan Edriana Pangestuti, 2019).

Manajemen risiko adalah ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan masalah yang terjadi dengan menempatkan pendekatan manajemen yang komprehensif dan sistematis (irham fahmi, 2011). Sedangkan Risiko sendiri dapat disebut sebagai penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. (Muhammad Harlianto Purnama, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pengindraan (gambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, 2013). Lokasi penelitian dalam penelitian ini antara lain dikantor BPBD Provinsi Sumatera Barat, terletak di jalan Jenderal Sudirman, Nomor 47, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; Kediaman informan, bapak Khalid Syaifullah di Lubuk Lintah, Kuranji, Kota Padang; Via telepon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung

1. Pegawai di BPBD memiliki kapasitas yang cukup dibidang masing dan BPBD memiliki Pull of Facilities.

Pegawai di BPBD Provinsi Sumatera Barat tentunya telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup syarat sebagai pengisi jabatan di BPBD Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan pengalaman kerja dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

2. Kesanggupan fasilitas dan logistik

Walaupun secara kasat mata tidak terlihat aset, logistik dan fasilitas yang begitu banyak namun logistik yang tersebar dikabupaten /kota bahkan nasional dapat menjadi sistem support dalam hal penanggulangan bencana.

3. Koordinasi

Koordinasi antara BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak TNI dalam penyelesaian permasalahan lahan pemukiman korban tsunami, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam program - program pra bencana, ketika bencana ,maupun pasca bencana.

4. Adanya forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Forum PRB sebagai forum yang bersifat advokasi, fasilitasi, konsultasi dan monitoring membantu BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam program - program pengurangan risiko bencana, salah satu bentuk upaya forum PRB adalah technical assistance and training Teams (TATs) agar pegawai didalam BPBD dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Faktor penghambat

1. Tugas yang terkadang tidak terduga atau maksudnya tidak pada tugas pokok masing - masing pegawai.

Berdasarkan wawancara adanya keterangan mengenai pegawai yang ada di BPBD Provinsi Sumatera Barat diberi tugas yang terkadang dirasa berada diluar jobdesk atau diluar dari tugas yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga butuh waktu agar para pegawai dapat beradaptasi terhadap tugas - tugas yang diberikan tersebut.

2. Anggaran

Dalam beberapa program adakalanya anggaran menjadi penghambat dikarenakan forum PRB juga memiliki usulan program, seperti misalnya training TTATs yang berasal dari Mercy Corps.

Kesulitan dalam penyingkronan dikarenakan anggaran kerap terjadi.

3. Kurang fahamnya beberapa pihak pemerintahan yang lebih rendah maupun masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika adanya upaya dari BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam membuat pemukiman baru untuk warga korban Tsunami di Mentawai. Hambatannya yaitu penolakan dari pihak kepala suku yang juga menjadi kepala pemerintah setingkat desa dikarenakan kepala suku tersebut belum berkenan mengizinkan wilayah adatnya dijadikan pemukiman baru untuk korban yang masih selamat Tsunami mentawai.

Akibatnya adanya hambatan dalam efisiensi waktu dalam upaya penanggulangan bencana. Sehingga pihak BPBD Provinsi Sumatera Barat serta pihak TNI yang juga turut dalam operasi melakukan langkah paksa dengan angkat senjata agar pemimpin setempat mau memberi izin dalam pemanfaatan lahan.

KESIMPULAN

Faktor pendukung efektivitas kapasitas kelembagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah adanya Forum PRB,

Ketersediaan fasilitas dan logistik yang cukup, Pegawai - pegawai yang memiliki kapasitas yang cukup dalam kinerja dan koordinasi yang cukup bagus sedangkan pada faktor penghambat adalah kolaborasi kebijakan dan program terhalang anggaran dan kurang fahamnya beberapa pihak lembaga dan masyarakat mengenai penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Hartono. (2016). Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Volume 4*, (Studi Kasus: Taman Flora dan Taman Ekspresi Di Kota Surabaya)".).
- Alhadi, Z. (2014). Kesiapan jalur dan Lokasi Evakuasi Publik Menghadapi Resiko Bencana Gempa dan Tsunami di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana). *Humanus*, 8 No.
- Andi Samsu Alam dan Ashar Prawitno. (2015). *Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Volume 8*,
- Arqom, A. dan. (2012). *Konstruksi*

- Masyarakat Tangguh Bencana*. Mizan Pustaka.
- Eko Budi Santoso. (2013). Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan. *Jurnal Penataan Ruang, Volume 8*.
- Undang Undang Nomor 24, (2007).
- irham fahmi. (2011). *Manajemen Risiko - teori, kasus, dan solusi*. alfabeta.
- Muhammad Harlianto Purnama, T. dan A. H. (2004). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Ekspertir Yang Menggunakan Metode Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi Pasuruan). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 16 No.*
- Nia Juliawati. (2012). Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi : Sebuah Kerangka Studi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.8, No., 177-192*.
- Novita Sari dkk. (n.d.). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu : Studi Pada Kantor Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol . 2, N, 634-640*.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Randa, D. dan Z. (2019). Efektifitas kinerja bpbd kabupaten tanah datar dalam melakukan mitigasi terhadap resiko bencana letusan gunung api marapi. *Journal of Multidisciplinary Research and Development, volume 1(issue 3)*.
- Raudya Dimas Wicaksono dan Edriana Pangestuti. (2019). Analisis Mitigasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 71 No((Studi pada Kampung Wisata Jodipan Kota Malang))*.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Rajagrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2011). *Budaya Organisasi*. Kencana.